

BAB V

KESIMPULAN

A. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.¹ Jadi kebijakan merupakan persaingan, sinergi dan kompromi dari berbagai gagasan para aktor pembuat kebijakan yang mewakili kepentingan-kepentingan yang menyangkut *issue* publik. Sedangkan implementasi merupakan suatu kajian kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yaitu dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan.²

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditunjang oleh suatu variabel-variabel penentu keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh beberapa variabel. Diantaranya adalah isi kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan asumsi peneliti, dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti berharap data tersebut dapat menjadi jawaban dari pertanyaan dalam

¹Edi Suharto. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008. Hlm 3.

²Riant Nugroho. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2008. Hlm 432.

persoalan dalam penelitian ini, serta bisa menjadi bahan dalam menganalisis dan memenuhi kebutuhan dari tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi peraturan daerah No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam upaya penertiban pedagang kaki lima payung ceper pantai Purus Padang.

Peneliti di sini melihat dan mengklarifikasikan bahwa adanya wewenang dari pemerintah daerah untuk mengatur dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman bagi masyarakatnya. Melihat wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan daerah No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang di dalam perda ini juga mengatur mengenai pedagang kaki lima serta tingkah laku masyarakat agar tidak melanggar norma-norma, adanya masalah mengenai pedagang kaki lima yang sengaja memberikan fasilitas atau tempat bagi para pengunjung untuk berbuat hal yang melanggar norma-norma dan hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah Kota Padang untuk menertibkannya.

Menurut Grindle, suatu implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil tergantung dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, oleh karena itu Grindle membagi variabel isi kebijakan ke dalam empat indikator pengukur keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya adalah:³

³Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2006. Hlm 154-156.

1. Isi Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005

Kebijakan merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu. Menurut Grindle, suatu implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil tergantung dari isi kebijakan itu sendiri. Oleh sebab itu, Grindle membagi variabel isi kebijakan ke dalam empat indikator pengukur keberhasilan implementasi diantaranya:

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam upaya penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti banyak melibatkan banyak kepentingan. Grindle melihat bahwa sejauhmana kepentingan kelompok sasaran implementasi kebijakan tersebut termuat dalam isi kebijakan perda No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Untuk memudahkan implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, perilaku-perilaku masyarakat juga harus diatur oleh pemerintah. Seperti dibentuknya peraturan khusus oleh pemerintah Kota Padang bagi para pedagang kaki lima yang mendirikan payung ceper di pantai Purus Padang. Alasan pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan khusus bagi para pedagang kaki lima tersebut, dikarenakan para pedagang melanggar beberapa aturan berdagang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang memberikan keterangan mengenai faktor yang menyebabkan dikeluarkannya peraturan khusus bagi pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang tersebut.

Medi Iswandi menyatakan:

”Dikeluarkannya peraturan khusus atau surat keputusan walikota no 161 tahun 2007 bagi para pedagang kaki lima yang mendirikan payung ceper di pantai Purus Padang tersebut yaitu untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan di ruang publik atau pada masyarakat, karena adanya pemanfaatan fasilitas umum untuk berdagang, serta tidak jelasnya sumber retribusi pendapatan para pedagang.”⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh Robert Chandra EP:

”peraturan tersebut dibentuk sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman pada masyarakat, dan juga bertujuan untuk menertibkan para pedagang yang dengan sengaja menggunakan fasilitas umum untuk berdagang.”⁵

Alasan lain pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan khusus bagi para pedagang kaki lima yang mendirikan payung ceper di pantai Purus, dikarenakan para pedagang tersebut melanggar beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang yaitu para pedagang menggunakan fasilitas umum untuk berdagang dan dengan sengaja memberikan peluang kepada para pengunjung untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma.

⁴Wawancara dengan Medi Iswandi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, jalan Samudera No 1 Padang. Tanggal 27 November 2015, pukul 11.30 WIB.

⁵Wawancara dengan Robert Chandra EP Kepala Bidang Objek dan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang jalan Samudera No. 1 Padang Sumatera Barat. Tanggal 17 November 2015, pukul 12.00 WIB.

seperti yang dikatakan oleh Firman Daus:

”Peraturan khusus yang diperuntukkan bagi para pedagang kaki lima payung ceper tersebut didasari oleh fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu para pedagang dengan sengaja menceperkan payung-payung pantai mereka dan meninggalkan barang dagangan mereka di lokasi berjualan serta untuk menciptakan ketertiban pada masyarakat.”⁶

Hal serupa juga dikatan oleh Irwan:

”Adanya peraturan khusus bagi para pedagang payung ceper tersebut karena para pedagang dengan sengaja memfasilitasi atau memberikan tempat bagi para pengunjung sehingga bisa terjadi perbuatan maksiat. Dan juga meninggalkan gerobak mereka di tempat mereka berjualan, padahal di peraturan sudah di tulis tidak boleh meninggalkan gerobak di tempat berjualan.”⁷

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa alasan pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan khusus bagi para pedagang payung ceper, dikarenakan para pedagang tersebut telah melanggar perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 pada bagian Bab V mengenai tata tertib pedagang kaki lima yaitu dengan sengaja merendahkan payung-payung pantai mereka serta meninggalkan barang dagangan mereka di lokasi berjualan. Alasan lain pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan ini adalah untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan di ruang publik.

⁶Wawancara dengan Firman Daus Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang, jalan Tan Malaka No 3c Kota Padang. Tanggal 30 November 2015, pukul 09.40 WIB.

⁷Wawancara dengan Irwan Kepala Bidang Penyuluhan Satpol PP Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 30 November 2015, pukul 09.15 WIB.

Sejauhmana kepentingan para para pedagang kaki lima payung ceper tersebut termuat dalam kebijakan ini, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang,

Medi Iswandi menyatakan:

”Kami sudah memberikan izin bagi pedagang payung ceper, tetapi bukan izin untuk mendirikan payung cepernya. Di dalam perda disebutkan sudah dikatakan bahwasanya mereka tidak boleh meninggalkan barang dagangan mereka dan juga sesuai dengan sk walikota dikatakan bahwa mereka harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, dan tidak memberikan peluang untuk maksiat. tujuan kebijakan tersebut sebenarnya sudah jelas di isi peraturannya, tujuan pemko Padang yaitu untuk membenahi objek wisata pantai Padang dan juga melakukan penataan terhadap para pedagang pantai Padang yang akan kami sesuaikan dengan tempat mereka berjualan.”⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Robert Chandra EP:

”Ada beberapa pedagang di pantai Padang ini yang tidak memiliki izin, tapi seluruh pedagang payung ceper memiliki izin dari dinas pariwisata kami mengelompokkan beberapa pedagang menjadi beberapa kelompok agar mudah untuk di data, tetapi pedagang payung ceper mendapatkan izinnya sebelum mereka mendirikan payung ceper itu dan mereka juga berjanji akan mematuhi aturan-aturan yang berlaku.”⁹

Kepentingan lain yang muncul dalam proses penertiban pedagang kaki lima payung ceper ini adalah bahwasanya adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai Pemko Padang, berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pedagang kelompok *Sembilan belas* payung ceper,

Jelani Uristian sebagai triangulasi menyatakan:

“Dulu tu kami ado mambayia urang retribusi namonyo nak ka apak dinas pariwisata. Keceknyo kalau kami mambayia uang retribusi tu kami ndak ka di

⁸Medi Iswandi., Ibid.

⁹Robert Chandra EP., Ibid.

gusur doh, kami buliah manggaleh disiko. Kami kan lah punyo izin tu harus mambayia retribusi jadinyo.”¹⁰

Terjemahan: dulu kami ada membayar yang namanya uang retribusi kepada bapak dinas pariwisata. Mereka mengatakan setelah kami membayar uang retribusi kami tidak akan di gusur, kami diperbolehkan berjualan disini. Kami kan sudah memiliki izin jadi kami harus membayar uang retribusi.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Irwan selaku kepala bidang bagian penyuluhan dan penyidik Satpol PP Kota Padang.

”Memang sewaktu kami para satpol pp melakukan penertiban atau razia ini, para pedagang melawan, menolak, serta marah-marah kepada satpol pp. Mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka telah membayar uang retribusi kepada para aparat-aparat kami dan mereka di janjikan untuk tidak ditertibkan jika mereka telah membayar uang retribusi tersebut. Tetapi kami dari pihak satpol pp tidak pernah meminta uang keamanan, karena tugas kami hanya untuk menertibkan para pedagang payung ceper.”¹¹

Robert Chandra EP menyatakan:

“Saya tidak menyangkal bahwa memang ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan pihak dinas pariwisata atau sebagainya, yang meminta uang keamanan atau retribusi kepada para pedagang payung ceper tersebut. Kami tidak pernah meminta uang retribusi kepada para pedagang, bagaimana kami akan meminta uang retribusi karena mereka tidak diperbolehkan berjualan karena melanggar aturan norma-norma yang telah diatur oleh pemko Padang, meskipun mereka sudah memiliki izin untuk berjualan. Jadi saat kami melakukan penertiban, para pedagang tersebut marah-marah kepada kami karena mereka mengatakan bahwa kami berjanji tidak akan menertibkan atau memindahkan mereka karena mereka telah membayar uang retribusi setiap bulannya.”¹²

Kusdarini sebagai triangulasi pakar/ahli menyatakan:

”Di dalam sebuah kebijakan harus terdapat kepentingan kelompok sasaran

¹⁰Wawancara dengan Jelani Uristian pedagang kelompok Sembilan belas, di depan danau Cimpago pantai Purus Padang. Tanggal 12 Desember 2015, 17.30 WIB.

¹¹Irwan., Ibid.

¹²Wawancara dengan Robert Chandra EP Kepala Bidang Objek dan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang jalan Samudera No. 1 Padang Sumatera Barat. Tanggal 17 November 2015, pukul 12.00 WIB.

kebijakan itu, agar kebijakan tersebut bisa di terima dan tidak merugikan sasaran kebijakan. Sebenarnya peraturan mengenai PKL payung ceper ini jelas bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, karena peraturan ini mengautr tetang PKL dan tingkah lakunya.”¹³

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa adanya beberapa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam proses penertiban para pedagang payung ceper ini, yaitu kepentingan untuk membenahi objek wisata pantai Padang dengan memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung dan juga dengan melakukan penataan ulang para pedagang dengan sesuai lahan dan tempat bagi para pedagang kaki lima tersebut. Sebenarnya di dalam kebijakan tersebut sudah diatur bahwa para pedagang tersebut dilarang untuk meninggalkan barang dagangan mereka dan juga memberikan fasilitas atau peluang kepada para pengunjung untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma, akan tetapi para pedagang tetap tidak mematuhi aturan tersebut setelah izin berdagang mereka diberikan oleh pemko Padang.

Kepentingan lain yang mempengaruhi yaitu adanya beberapa oknum yang mengaku sebagai perwakilan dari dinas kebudayaan dan pariwisata yang meminta uang retribusi kepada para pedagang payung ceper serta menjanjikan para pedagang tidak akan direlokasi atau ditertibkan jika mereka membayar uang retribusi tersebut.

Peneliti melihat bahwa dalam proses penerapan kebijakan ini, kepentingan para pedagang payung ceper yang ditertibkan belum sepenuhnya terdapat dalam isi

¹³Wawancara dengan Kusdarini di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Tanggal 07 Desember 2015, pukul 13.35 WIB.

kebijakan tersebut, serta adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan pribadi dalam proses penertiban para pedagang payung ceper ini. Sehingga hal-hal tersebut mempengaruhi dan dapat menghambat penerapan kebijakan yang akan direalisasikan kepada para pedagang payung ceper.

b. Tipe Manfaat Penertiban Pedagang Kaki Lima Payung Ceper di Pantai Purus Padang

Azas manfaat menurut Grindle juga merupakan penentu suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan sasaran kebijakan, maka kebijakan tersebut akan sia-sia saja. Sebuah kebijakan harus memiliki manfaat bukan hanya kepada masyarakat saja tetapi juga harus memiliki dampak yang positif bagi kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. Sehingga di dalam peraturan khusus yang diterapkan oleh pemerintah Kota Padang terhadap para pedagang kaki lima yang mendirikan payung ceper tersebut juga harus memiliki manfaat terhadap para pedagang yang ditertibkan.

Medi Iswandi menyatakan:

”Bahwasanya peraturan khusus yang diperuntukkan kepada pedagang kaki lima payung ceper tersebut tidak hanya memiliki manfaat yang positif kepada masyarakat saja, tetapi juga memiliki manfaat kepada para pedagang yang ditertibkan tersebut yaitu seperti adanya kepastian lokasi tempat mereka berdagang yang diatur oleh pemerintah kota Padang sendiri, fasilitas yang relatif lebih representative untuk berdagang, serta keamanan dan kenyamanan berdagang yang terhindar dari pungutan liar atau pungli, premanisme, dan pemalakkan.”¹⁴

¹⁴Wawancara dengan Medi Iswandi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, jalan Samudera No 1 Padang. Tanggal 27 November 2015, pukul 11.30 WIB.

Hal serupa juga dikatakan oleh Firman Daus:

”Peraturan yang dikeluarkan tersebut pasti juga memiliki dampak terhadap pedagang itu sendiri, yaitu para pedagang jadi lebih teratur dan juga diberikan lokasi yang pasti atau tempat khusus berdagang bagi para pedagang, sehingga mereka tidak akan ditertibkan lagi karena sudah memiliki lokasi yang jelas.”¹⁵

Berdasarkan pernyataan informan di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa manfaat dari kebijakan tersebut bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga memiliki manfaat kepada para pedagang yang ditertibkan yaitu adanya kepastian lokasi untuk berdagang, serta memberikan keamanan dan kenyamanan dan terhindar dari pungutan liar. Akan tetapi yang dikatakan informan berbeda dengan yang peneliti lihat di lapangan, yaitu pemko Padang baru bisa memberikan kepastian lokasi kepada para pedagang setelah beberapa tahun kebijakan ini berjalan. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan para pedagang menolak untuk ditertibkan.

Opet selaku pedagang kaki lima yang mendirikan payung ceper menyatakan hal yang berbeda:

*”Dulu kaminyo tertiban seh, siap tu petugas tu main pai seh lay. Lah di bongka-bongkanyo payuang-payuang tu diambiak loh kursi-kursi jo meja kami. Kecekyo kami ka diagiah tampek yang layak untuk manggaleh, tapi ndak jaleh ntah iyo ntah indak. Tu dima latak peraturan tu bermanfaat dek kami. Baru kini-kini ko ado solusi yang diagiah dek pemerintah yang baru, barunyo janjian ka kami k di agiah tampek di LPC (lapau panjang cimpago) tu aa, dulu ma ado.”*¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Firman Daus Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang, jalan Tan Malaka No 3c Kota Padang. Tanggal 30 November 2015, pukul 09.40 WIB

¹⁶Wawancara dengan Opet pedagang kelompok Sembilan belas payung ceper, di depan danau Cimpago pantai Purus Padang. Tanggal 12 Desember 2015, pukul 16.00 WIB.

Terjemahan: dulu para pedagang hanya di tertibkan saja, para petugas hanya menertibkan saja dan lalu pergi. Payung-payung kamipun sudah di bongkar dan kursi-kursi serta meja juga diambil oleh aparat. Para aparat mengatakan bahwa kami para pedagang akan diberikan tempat yang layak untuk berjualan, tapi hal itu apakah benar atau tidak. Terus bagi kami peraturan tersebut tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Baru sekarang diberikan solusi yang diberikan oleh pemerintah, kami di janjikan akan diberi tempat di *LPC* (lapau panjang cimpago), dulunya tidak ada.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Epi H, selaku ketua kelompok pedagang *sembilan belas* yang mendirikan payung ceper di pantai Purus Padang, menyatakan:

*"Waktu dulu-dulu ko kami main ditertibkan seh ndak ado solusinyo agiah dek pemko Padang ko doh, siap kami ditertiban tu aparat ko lapeh tangan seh. Ndak ado kaminyo agiahnyo solusi atau tampek dima ka manggaleh, kok yo kami ndak buliah manggaleh disiko tu ndak buliah payuang ceper ko ado lay. Siap dibongka kayak itu tu yo bisuaknyo kami tetap jo manggaleh lay, kok ndak jo apo kami ka makan. Tu dima lataknyo manfaat peraturan ko untuak kami, aturannyo pemerintah ko membela kami nan ketek-ketek ko lah. Pas akia tahun 2014 ko lah baru jaleh solusi nan di agiahan ka kami-kami pedagang ko, kecek pemko Padang ko kami nan pedagang payuang ceper ko di janjian ka di agiah tampek ciek-ciek surang di LPC muko danau cimpago tu nak aa."*¹⁷

terjemahannya: dulu kami main ditertibkan saja tidak ada solusi yang diberikan pemko padang kepada kami, setelah kami ditertibkan para aparat tidak ada tanggungjawabnya. Kami tidak ada diberi solusi dan tempat untuk berjualan, kalau iya kami tidak boleh berjualan serta mendirikan payung ceper ini. Kalau dibongkar seperti itu jelas kami besok tetap akan berjualan lagi, kalau tidak kami mau makan apa. Terus letak peraturan ini bermanfaat bagi kami tidak ada, seharusnya pemerintah ini membela kami yang kecil-kecil ini. Pada akhir tahun 2014 inilah kami para pedagang diberikan solusi, pemko padang akan memberikan kami para pedagang payung ceper ini akan diberikan masing-masing tempat di *LPC* depan danau cimpago itu.

Berdasarkan pernyataan infroman di atas, ternyata pada awal kebijakan ini diterapkan. Para pedagang tidak merasakan manfaat dari kebijakan itu sendiri,

¹⁷Wawancara dengan Epi H ketua pedagang kelompok *Sembilan belas* payung ceper, di depan danau cimpago pantai Purus padang. Tanggal 02 Desember 2015., pukul 17.15 WIB.

dikarenakan setelah penertiban dilakukan para pedagang tidak diberikan solusi atau tempat baru untuk berjualan. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan para pedagang kembali berjualan setelah ditertibkan oleh Pemko Padang.

Robert Chandra EP menyatakan:

”ya, memang itu merupakan salah satu kendala kami. Karena kami harus memberikan lokasi yang tepat untuk para pedagang dan lokasinya juga harus yang strategis. Sebenarnya bukan kami hanya menertibkan saja dan tidak memberikan solusi, akan tetapi sekarang kami sudah memberikan satu lokasi berdagang bagi seluruh pedagang kaki lima di pantai padang.”¹⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Irwan:

”Dulu karena belum adanya kepastian lokasi berdagang bagi pedagang payung ceper setelah ditertibkan memang menjadi salah satu faktor kendala untuk menertibkan pedagang tersebut. Setelah para pedagang diberikan *LPC* barulah mereka mau ditertibkan.”¹⁹

Triangulasi pakar Kusdarini menyatakan:

”Sebuah kebijakan harus memiliki manfaat juga terhadap sasaran kebijakan itu sendiri, tidak hanya berdampak positif kepada masyarakat akan tetapi juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap yang sasaran kebijakan itu sendiri. Seperti halnya penertiban pedagang kaki lima payung ceper ini, di dalam kebijakan tersebut pemerintah juga harus memiliki solusi atau upaya lain di awal proses penerapan kebijakan tersebut, agar penerapan kebijakan ini berjalan dengan lancar dan jelas. Sebenarnya pemerintah Kota Padang sudah mengeluarkan solusi untuk penertiban PKL setelah lahirnya perda No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam SK Walikota terkait dengan tempat lokasi PKL seperti yang tercantum dalam pasal 8 Perda ini. Tetapi solusi ini belum efektif dilakukan.”²⁰

¹⁸Robert Chandra EP., Ibid.

¹⁹Wawancara dengan Irwan Kepala Bidang Penyuluhan Satpol PP Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 30 November 2015, pukul 09.15 WIB

²⁰Wawancara dengan Kusdarini di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Tanggal 07 Desember 2015, pukul 13.35 WIB.

Dari pernyataan-pernyataan informan di atas peneliti melihat bahwa manfaat yang dirasakan oleh para pedagang terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Padang ini baru terasa setelah kebijakan atau penertiban dilakukan setelah beberapa tahun. Karena berdasarkan fenomena yang peneliti lihat, bahwasanya beberapa tahun sebelumnya pemko Padang belum menemukan penyelesaian masalah mengenai fenomena pedagang payung ceper ini. Para pedagang payung ceper tersebut selalu menolak untuk ditertibkan dan menolak untuk mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemko Padang, dikarenakan pemko Padang tidak memberikan solusi yang tepat bagi pedagang payung ceper yang ditertibkan.

Sehingga hal tersebut membuat para pedagang payung ceper merasa dirugikan dan merasa bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak apa-apa bagi para pedagang itu sendiri, meskipun para pedagang tersebut mengetahui bahwa mereka telah melanggar peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemko Padang. Disini peneliti melihat bahwa setelah kebijakan tersebut berjalan beberapa tahun, pemko Padang baru bisa memberikan solusi terhadap para pedagang payung ceper dan mau diterima oleh para pedagang yang ditertibkan tersebut.

Peneliti melihat bahwa dalam tipe manfaat kebijakan ini telah memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat, sehingga dalam proses penertiban para pedagang payung ceper tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat. Akan tetapi manfaat dari kebijakan ini tidak dirasakan oleh para pedagang payung ceper yang ditertibkan, dikarenakan tidak adanya kepastian lokasi berdagang yang baru kepada

para pedagang payung ceper setelah dilakukannya penertiban. Sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi proses penerapan kebijakan, karena dalam proses penerapan sebuah kebijakan seharusnya juga mendapatkan respon yang positif dari sasaran kebijakan itu sendiri.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai dalam penertiban pedagang kaki lima di pantai Purus Padang

Menurut Grindle, dalam setiap pembuatan kebijakan memiliki target yang ingin dicapai. Seberapa besarkah perubahan yang diinginkan harus sangat jelas. Jangan sampai setelah kebijakan siap untuk di implementasikan dan berjalan baik di mata implementor, tetapi hasilnya tidak ada. Atau bahkan perubahannya hanya sedikit dan jauh dari target awal para aktor kebijakan. Tujuan ditertibkannya para pedagang kaki lima payung ceper ini adalah untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat, karena fenomena tersebut telah meresahkan masyarakat Kota Padang dan merusak citra wisata pantai Padang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di pantai Purus Padang yaitu dengan sengaja para pedagang kaki lima tersebut merendahkan payung-payung pantai mereka dan dengan sengaja memberikan fasilitas kepada para pengunjung yang bisa menyebabkan terjadinya perbuatan yang melanggar norma-norma. Serta lokasi para pedagang payung ceper tersebut tepat berada di depan pantai dan dapat menutup pemandangan ke arah pantai itu sendiri, sehingga pemandangan di depan pantai Padang tersebut hanya terdapat payung-payung ceper serta kafe-kafe yang berjejer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang,

Medi Iswandi menyatakan:

”Dengan adanya payung ceper, tidak hanya meresahkan masyarakat saja tetapi juga mencoreng citra wisata pantai padang. Payung ceper itu bukan hanya meresahkan masyarakat akan tetapi lokasi para pedagang tersebut juga menghalangi kearah pantai, bukan hanya para pedagang yang mendirikan payung ceper saja tetapi juga terhalang oleh para pedagang-pedagang lain yaitu seperti kafe-kafe yang berdiri di depan pantai Padang itu.”²¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Firman Daus:

”Fenomena pedagang yang mendirikan payung ceper tersebut merusak wisata pantai Padang, payung ceper ini sudah sampai ke nasional. Sehingga para wisatawan yang datang ke pantai Padang tidak bisa memandang lepas kearah pantai, karena ditutupi oleh payung ceper dan ditutupi juga oleh lapak atau kafe pedagang-pedagang lainnya.”²²

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas peneliti dapat melihat bahwa fenomena payung ceper tersebut dapat merusak citra wisata pantai Padang, dengan didirikannya payung ceper di pinggir-pinggir pantai dapat menghalangi para pengunjung untuk melihat ke arah pantai itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut perubahan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Padang melalui penerapan kebijakan ini adalah pemko Padang ingin menertibkan perilaku para pedagang kaki lima payung ceper tersebut yang telah melanggar norma-norma, serta menertibkan

²¹Wawancara dengan Medi Iswandi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, jalan Samudera No 1 Padang. Tanggal 27 November 2015, pukul 11.30 WIB.

²²Wawancara dengan Firman Daus Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang, jalan Tan Malaka No 3c Kota Padang. Tanggal 30 November 2015, pukul 09.40 WIB.

para pedagang yang berjualan di lokasi objek wisata pantai Padang. Seperti halnya yang dikatakan oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang,

Medi Iswandi menyatakan:

”Tentu di dalam sebuah kebijakan pasti di dalamnya terdapat seberapa besar perubahan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan tersebut. Disini sudah jelas bahwa perubahan yang ingin dicapai oleh pemko Padang yaitu membersihkan pantai Padang dari payung ceper atau memberantas maksiat payung ceper itu dengan membongkar serta menertibkan para pedagang payung ceper tersebut, serta membersihkan seluruh para pedagang-pedagang kaki lima yang menutupi pemandangan-pemandangan kearah pantai. Setelah para pedagang tersebut ditertibkan kami juga berjanji akan memberikan tempat berdagang yang baru dan sudah dilegalkan oleh pemerintah. Karena tujuan yang ingin dicapai oleh pemko Padang yaitu menjadikan pantai Padang sebagai tempat wisata keluarga.”²³

Pandangan mengenai derajat perubahan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang ini apakah sudah jelas atau tidaknya, berikut hasil wawancara peneliti dengan triangulasi pakar kebijakan

Kusdarini sebagai triangulasi pakar menyatakan:

”Dalam kebijakan sudah jelas bahwa tujuan pemko Padang yaitu ingin menertibkan para pedagang payung ceper tersebut. Sehingga di dalam proses pengimplementasian perda tersebut, para aktor-aktor kebijakan sudah memiliki visi dan misi yang jelas di dalam proses penerapan kebijakan yang akan mereka terapkan karena sudah memiliki tujuan yang jelas dari awal.”²⁴

Dari pernyataan informan tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa perubahan yang ingin dicapai oleh Pemko Padang dalam peraturan daerah No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini yaitu ingin menerapkan ketertiban kepada para pedagang payung ceper yang telah melanggar

²³Medi Iswandi., Ibid.

²⁴Kusdarini., Ibid.

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemko Padang, membersihkan pantai Padang dari payung-payung ceper, serta ingin menjadikan pantai Padang sebagai objek wisata keluarga (objek wisata yang layak dikunjungi oleh anak-anak beserta keluarga). Pemko Padang disini juga ingin merubah lokasi berjualan para pedagang-pedagang kaki lima yang menutupi pemandangan pantai Padang, tidak hanya bagi pedagang payung ceper saja. Pemko Padang akan memberikan tempat khusus bagi para pedagang kaki lima yang telah ditertibkan, yang lokasi mereka berjualan diberikan satu lokasi khusus bagi para pedagang yang lokasi tersebut tidak akan mengganggu pemandangan para pengunjung kearah pantai Purus Padang.

Peneliti melihat bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini sudah memiliki target yang jelas dari awal penerapan kebijakannya, dikarenakan tujuan pemko Padang menertibkan para pedagang tersebut adalah untuk memperbaiki citra wisata pantai Padang dan menjadikan obejk wisata yang layak untuk dikunjungi oleh keluarga. Meskipun awal penerapan kebijakan ini mendapatkan penolakkan dari sasaran kebijakan itu sendiri, karena suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran sangatlah sulit mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran kebijakan itu sendiri.

d. Letak pengambilan keputusan dalam penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

Pengambilan keputusan memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan, sehingga dalam indikator ini letak pengambilan

keputusan yang akan di implementasikan harus jelas. Jangan sampai penyalahgunaan wewenang dalam implementasi akan berdampak kepada sasaran dan juga pelaksana kebijakan dalam menertibkan para pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang tersebut. Dalam hal pengambilan keputusan harus dilakukan oleh orang yang duduk dalam struktur organisasi yang sifatnya formal, sehingga setiap pengambilan keputusan harus dilakukan oleh orang yang bisa menangani persoalan yang sedang terjadi atau bahkan akan terjadi nantinya.

Apabila letak pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh orang duduk dalam struktur organisasi formal, maka proses pengimplementasian tidak akan berjalan dengan sempurna karena akan terdapat unsur kepentingan-kepentingan pribadi yang di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam peraturan daerah tersebut. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang,

Medi Iswandi menyatakan:

”Lokasi para pedagang payung ceper tersebut berlokasi di daerah wisata Kota Padang dan hal tersebut merupakan tanggungjawab dari dinas pariwisata yang telah diberikan oleh pemko Padang. Disini kami memiliki kewenangan dalam proses serta tindakan yang akan diambil untuk penertiban pedagang payung ceper ini, yang setelah itu kami berkoordinasi bersama Satpol PP, Lurah Bandar Purus, serta Camat Padang Barat dengan mengadakan rapat di kantor dinas pariwisata untuk membahas mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam proses penertiban para pedagang payung ceper ini.”²⁵

Firman Daus juga menyatakan hal yang sama:

”Disini dinas pariwisata meminta bantuan kepada Satpol PP untuk menertibkan pedagang payung ceper itu, kami melakukan tindakan

²⁵Medi Iswandi., Ibid.

berdasarkan koordinasi dari dinas pariwisata kepada kepala dinas Satpol PP lalu kepala dinas pun memberikan tugas kepada kami untuk menertibkan para pedagang payung ceper di pantai Purus itu. Di dalam penertiban itu kami juga bekerja sama dengan Camat Padang Barat, dan Lurah Bandar Purus karena lokasi para pedagang tersebut berada di wilayah mereka. Tetapi Satpol PP juga bekerjasama dengan TNI dan Polri jika kondisi tidak memungkinkan lagi dalam proses penertiban seperti pembongkaran dan pembakaran lapak-lapak payung ceper pedagang, karena ditakutkan adanya tindakan penolakan dari pedagang seperti kayak melempar-lempar petugas dan menghalangi petugas dalam pembongkaran, makanya kami juga melakukan kerjasama dengan TNI dan Polri.”²⁶

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang bertanggungjawab terhadap penataan lokasi berdagang para pedagang kaki lima payung ceper yang berlokasi di pantai Purus Padang tersebut. Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Padang untuk menertibkan para pedagang payung ceper, dan juga bekerjasama dengan lurah Bandar Purus serta camat Padang Barat. Letak pengambilan keputusan dalam proses penerapan kebijakan dan penertiban para pedagang payung ceper ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami fenomena yang terjadi di lapangan.

Salman menyatakan:

”Memang dinas pariwisata berkoordinasi dengan Kelurahan Bandar Purus untuk menertibkan pedagang payung ceper ini, kami hanya menunggu koordinasi dari dinas pariwisata saja. Kelurahan Bandar Purus hanya bertugas mengajak para pedagang untuk meninggikan kembali payung cepernya atau membongkar payung ceper dan juga memberikan arahan-arahan kepada para pedagang payung ceper. Yang lebih berhak untuk membongkar dan memberi

²⁶Firman Daus., Op.Cit.

peringatan adalah dinas pariwisata dan juga Satpol PP. Kelurahan Bandar Purus juga berkoordinasi dengan Satpol PP, Camat Padang barat.”²⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh Camat Padang Barat, Arfian menyatakan:

”Tugas Kecamatan Padang Barat disini sama halnya dengan Kelurahan Bandar Purus yaitu tugas kami hanya memberikan arahan dan mengajak pedagang untuk tidak mendirikan payung ceper lagi, karena hal itu dapat mengundang maksiat dan merusak nama wisata pantai Padang. Kami melakukan hal tersebut atas koordinasi dari dinas pariwisata sendiri, dan dinas pariwisata juga mengajak kami rapat bersama Satpol PP dan Lurah Bandar Purus untuk membicarakan langkah-langkah yang baik yang akan dilakukan dalam penertiban pedagang payung ceper ini.”²⁸

Berdasarkan pernyataan-pernyataan infroman di atas peneliti dapat melihat bahwa dinas kebudayaan dan pariwisata serta satpol pp Kota Padang, juga melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan Bandar Purus dan juga kecamatan Padang Barat. Kelurahan Bandar Purus dan Kecamatan Padang Barat bertugas untuk memberikan pengawasan, sosialisasi dengan cara arahan atau persuasif kepada para pedagang agar tidak mendirikan payung ceper kembali.

Di dalam sebuah kebijakan letak pengambilan keputusan dalam proses penerapan kebijakan tersebut harus jelas. Karena dalam hal pengambilan keputusan harus dilakukan oleh orang yang duduk dalam struktur organisasi yang sifatnya formal, karena setiap pengambilan keputusan harus dilakukan oleh orang yang bisa menangani persoalan yang sedang terjadi atau bahkan akan terjadi nantinya. Berikut hasil wawancara peneliti dengann triangulasi pakar atau ahli kebijakan

²⁷Wawancara dengan Salman Lurah Bandar Purus, di kantor Kelurahan Bandar Purus. Tanggal 23 November 2015, pukul 10.00 WIB.

²⁸Wawancara dengan Arfian Camat Padang Barat, di kantor Kecamatan Padang barat jalan Veteran No 85 Padang Barat Kota Padang. Tanggal 24 November 2015, pukul 11.20 WIB.

Kusdarini menyatakan:

”Dalam perda yang mengatur PKL ini, khususnya pedagang payung ceper memang dinas pariwisata yang memiliki hak untuk mengatur karena berada di kawasan objek wisata yang termasuk dalam ruang lingkup dinas pariwisata, yang dinas pariwisata memang bertanggungjawab kepada Pemko Padang. jadi disini memang dinas pariwisata memiliki andil dalam proses penertiban dan juga melakukan koordinasi dengan aktor-aktor kebijakan lainnya. Jadi, sudah ada kejelasan dalam proses pengambilan keputusan agar tidak adanya *miss* komunikasi dalam proses penertiban.”²⁹

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang, sudah berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Karena di dalam proses penerapan kebijakan tersebut dinas pariwisata selaku pihak yang memegang kendali dalam proses penerapan tersebut juga melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan proses pembongkaran dan penertiban para pedagang payung ceper, serta juga melibatkan Lurah Bandar Purus dan Camat Padang Barat. Sehingga pihak-pihak tersebut saling berkoordinasi melakukan tugasnya masing-masing dalam proses penertiban pedagang payung ceper yang berada di bawah koordinasi dari dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang.

Peneliti disini melihat bahwa proses pengambilan keputusan dalam penerapan kebijakan ini dilakukan oleh pihak yang duduk dalam struktur organisasi formal serta yang memahami situasi di lapangan.

²⁹Wawancara dengan Kusdarini di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Tanggal 07 Desember 2015, pukul 13.35 WIB.

e. Pelaksana program penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

Implementasi suatu kebijakan harus di dukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan memiliki kapasitas yang tinggi. Suatu badan pemerintahan sebagai pelaksana harus benar-benar bergerak dalam bidangnya, jangan sampai para aktor atau pelaksana kebijakan tidak memahami isi dari kebijakan itu sendiri. Grindle menyatakan implementasi kebijakan dapat berhasil jika implementornya adalah orang yang kompeten di dalam bidangnya.

Untuk penertiban para pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang ini harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait atau memahami permasalahan tersebut seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, jadi para implementor tersebut harus mengetahui tugas mereka masing-masing dalam proses penerapan kebijakan yang akan diterapkan kepada kelompok sasaran kebijakan. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi adalah:

”Pihak-pihak yang berperan penting dalam proses penertiban yaitu kepala bidang objek dan wisata serta seksi trantib dinas pariwisata, yang mereka langsung bertanggungjawab kepada saya. Dan pihak tersebut juga berkoordinasi dengan pihak-pihak dari Satpol PP dan juga Lurah Bandar Purus serta Camat Padang Barat. Karena lokasi para pedagang tersebut berada di kelurahan dan kecamatan yang merupakan ruang lingkup kelurahan Purus dan Kecamatan Padang Barat.”³⁰

³⁰Medi Iswandi., Ibid.

Berdasarkan pernyataan informan di atas di dalam proses penertiban pedagang kaki lima payung ceper ini selain dinas kebudayaan dan pariwisata, Satpol PP juga merupakan aktor dalam kebijakan tersebut. Sehingga dinas kebudayaan dan pariwisata juga melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Firman Daus menyatakan:

”Satpol PP telah membagi beberapa anggota yang terlibat atau bertanggungjawab dalam penertiban payung ceper ini yaitu kabit penyelidikan dengan bagian-bagiannya, kasi operasi pengendalian, serta ketua koordinator penyidik yang saling berkoordinasi. Kami sudah memberikan tugas dan fungsi yang jelas.”³¹

Dalam pelaksanaan program penertiban seperti melakukan pembongkaran payung ceper dan menertibkan para pedagang disini merupakan tugas dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak peraturan daerah. Sehingga pelaksanaan program lainnya diambil alih oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. Seperti yang dikatakan oleh kepala bidang bagian objek dan wisata,

Robert Chandra EP menyatakan:

”Bahwa bagian bidang objek dan wisata bertugas untuk menata atau mengatur pedagang yang telah menghalangi pemandangan-pemandangan ke pantai atau menutup bagian pantai, dan juga mengatur lokasi berjualan yang baik bagi pedagang agar tidak merusak tempat wisata. Sedangkan dalam proses pengendalian serta penertiban pedagang seperti membongkar dan membakar payung ceper kami juga berkoordinasi dengan Pol-PP.”³²

³¹Firman Daus., Ibid.

³²Robert Chandra EP., Ibid.

Hal serupa juga dikatakan oleh Irwan:

”Dalam proses pelaksanaan penertiban bagian trantib, bagian operasi dan pengendalian, serta koordinator penyidik sama-sama bertugas yaitu menertibkan para pedagang dan langsung turun ke lapangan menertibkan. Yaitu seperti memberi peringatan, membongkar, serta membakar payung ceper tersebut. Sebelum terjun ke lapangan kami sudah mengarahkan dan memberi tugas masing-masing yang akan dilakukan di lapangan.”³³

Kusdarini sebagai triangulasi pakar/ahli menyatakan:

”Dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan harus dilaksanakan oleh lembaga formal yang memiliki kewenangan atau oleh pihak-pihak yang memahami kondisi di lapangan.”³⁴

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk hal-hal yang berhubungan dengan proses penertiban para pedagang payung ceper tersebut, dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang memiliki wewenang dalam proses tersebut karena langsung bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota Padang melalui sekretaris daerah. Dinas kebudayaan dan pariwisata disini memiliki tugas dalam perencanaan lokasi para pedagang kaki lima payung ceper tersebut, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja bertugas sebagai penegak dalam peraturan daerah tersebut yang langsung bertanggungjawab kepada kepala dinas mereka. Satpol PP bertugas untuk menertibkan dan membongkar serta melakukan tindakan-tindakan lainnya. Artinya disini mereka sudah memahami isi kebijakan dan mengetahui tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam proses penertiban para pedagang kaki lima payung ceper tersebut.

³³Ibid.,

³⁴Kusdarini., Ibid.

Peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan program penerapan kebijakan ini dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang dan satpol pp Kota Padang berkoordinasi dalam proses penertiban para pedagang payung ceper tersebut. Aktor-aktor kebijakan tersebut telah memahami isi kebijakan serta fungsi mereka masing-masing dalam proses penerapan kebijakan yang akan dilakukan.

f. Sumber daya yang digunakan dalam upaya penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

Untuk menunjang keberhasilan implementasi sebuah kebijakan harus mempunyai sumber daya yang jelas. Grindle membagi sumber daya menjadi dua bagian, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial (uang) merupakan penentu keberhasilan suatu kebijakan begitu juga dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud oleh Grindle dalam hal ini adalah orang-orang yang berada diluar implementor yang juga ikut membantu menyukseskan kebijakan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu penunjang keberhasilan kebijakan publik. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah kemampuan atau pengetahuan para implementor, serta jumlah aparat yang sebanding dengan para pedagang kaki lima yang ditertibkan dan juga orang-orang yang berada diluar pelaksana kebijakan. Dalam permasalahan penertiban pedagang payung ceper ini, faktor kurangnya personil dan juga dukungan dari masyarakat yang membuat lambatnya proses penerapan kebijakan serta penertiban para pedagang payung ceper

tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua koordinator penyidik Satpol

PP Kota Padang

Amzarus menyatakan:

”Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses pemberantasan payung ceper ini karena kami kekurangan personil untuk terjun ke lapangan, seringkali setiap kami melakukan penertiban jumlah kami tidak sebanding dengan para pedagang yang ditertibkan. Apalagi menertibkan pedagang yang wanita, begitu susah bagi kami. Dan juga kami juga kurang mendapatkan dukungan masyarakat sekitar, ya karena rata-rata pedagang itu kan juga tinggal dan menjadi masyarakat disini.”³⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh Medi Iswandi:

”Memang rata-rata pedagang yang berjualan di pantai ini memang kebanyakan warga sekitar sini, jadi kami juga susah mendapatkan dukungan atau meminta bantuan kepada masyarakat. Hanya sebagian masyarakat saja yang mendukung, karena kebanyakan masyarakat sekitar sudah bosan dengan pedagang payung ceper ini atau bisa dibilang sudah terbiasa dengan payung ceper tersebut. Karena sudah biasa di lihat oleh masyarakat sini. Yah dukungan yang ada palingan dari pengunjung-pengunjung yang datang yang merasa risih melihat payung-payung ceper tersebut.”³⁶

Berdasarkan pernyataan informan di atas, bahwa kurangnya sumber daya manusia seperti tidak sebandingnya jumlah personil dengan para pedagang yang akan ditertibkan, serta kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses penertiban para pedagang kaki lima payung ceper ini. Karena kebanyakan warga sekitar pantai Padang yang juga merupakan para pedagang payung ceper tersebut.

³⁵Wawancara dengan Amzarus Ketua Koordinator Penyidik Satpol PP Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 24 November 2015, pukul 14.00 WIB.

³⁶Medi Iswandi., Ibid.

Bukan hanya sumber daya manusia akan tetapi sumber daya finansial (uang) juga menjadi aspek penting penunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena dalam proses penertiban faktor finansial juga menjadi aspek penunjang yang penting. Seperti hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Satpol PP berikut ini

Firman Daus menyatakan:

”Salah satu yang memperlambat kinerja kami beberapa tahun lalu dalam menertibkan pedagang payung ceper karena kami kekurangan sarana prasarana, seperti kami kekurangan pengadaan alat dalam melakukan penertiban.”³⁷

Hal serupa juga dikatakan oleh Irwan:

”Ya, dalam proses penertiban payung ceper ini kekurangan kami disini adalah letaknya pada sumberdaya manusia serta keterbatasan dana yang ada. Kami memiliki keterbatasan personil serta kekurangan alat-alat pendukung dalam melakukan penertiban, ya seperti alat-alat pelindung bagi Satpol PP dan juga mobil untuk melakukan kegiatan. Akan tetapi sekarang sudah teratasi karena payung ceperkan sekarang sudah tidak ada atau bisa di bilang sudah musnah dan bisa ditertibkan, karena para pedagang sekarang sudah patuh pada aturan.”³⁸

Sedangkan triangulasi pakar Kusdarini menyatakan:

”Faktor sumberdaya manusia dan finansial ini memang selalu menjadi masalah atau faktor yang memperlambat berjalannya sebuah kebijakan. Karena dalam proses penerapan sebuah kebijakan harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai baik itu dari aktor kebijakan itu sendiri ataupun dari luar aktor kebijakan itu sendiri (masyarakat), serta harus di dukung dengan dana untuk penunjang proses penerapan kebijakan tersebut.”³⁹

³⁷Firman Daus., Ibid.

³⁸Wawancara dengan Irwan Kepala Bidang Penyuluhan Satpol PP Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 30 November 2015, pukul 09.15 WIB.

³⁹Wawancara dengan Kusdarini di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Tanggal 07 Desember 2015, pukul 13.35 WIB.

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial (uang), merupakan salah satu faktor yang membuat lambatnya proses penertiban para pedagang kaki lima payung ceper ini. Karena dalam proses penertiban para aktor kebijakan mengakui bahwa mereka kekurangan personil dalam proses penertiban, serta jumlah mereka tidak sebanding dengan para pedagang yang akan ditertibkan dan juga kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap fenomena payung ceper ini. Faktor selanjutnya yaitu adanya kekurangan pengadaan dana dalam proses penertiban para pedagang payung ceper ini, juga menjadi salah satu faktor penghambat proses penertiban. Karena disini mereka kekurangan alat penunjang untuk melakukan proses penertiban seperti alat-alat, dan juga sarana transportasi untuk mengangkut para personil dan juga lapak-lapak para pedagang yang telah ditertibkan.

Seharusnya sebelum pemerintah merumuskan sebuah kebijakan, pemerintah harus memperhatikan faktor pendukung dalam proses penerapan kebijakan yang akan dilakukan. Karena faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial (uang) akan sangat mempengaruhi proses penerapan kebijakan itu sendiri.

Peneliti melihat bahwa dalam indikator sumber daya yang digunakan dalam penerapan kebijakan ini tidak tercapai, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yaitu tidak sebandingnya jumlah aparat dengan para pedagang yang akan ditertibkan serta kurangnya sumber daya finansial (uang) sebagai penunjang dalam proses

penerapan kebijakan. Sehingga hal ini dapat menghambat proses penerapan kebijakan dalam proses penertiban para pedagang kaki lima payung ceper.

2. Lingkungan kebijakan dalam upaya penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat didukung oleh aktor kebijakan yang terlibat di dalamnya, baik dalam perumusan hingga implementasi kebijakan tersebut berjalan. Tak jarang banyak nilai yang dimiliki oleh setiap aktor dalam menentukan sebuah perencanaan, seperti nilai kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan juga menjadi penunjang dalam proses penerapan kebijakan itu sendiri.

Untuk mempermudah analisa kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dalam penerapan kebijakan dan penertiban pedagang kaki lima payung ceper ini, peneliti membaginya dalam dua bagian yaitu :

a) Kekuasaan dan kepentingan-kepentingan dalam penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

Untuk melihat indikator-indikator tersebut, maka berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang bagian objek dan wisata dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang.

Robert Chandra EP menyatakan:

”Tidak ada kekuasaan atau kepentingan-kepentingan tertentu di dalam proses penertiban para pedagang payung ceper ini. Kami selaku dinas kebudayaan dan pariwisata bekerja sama dengan satpol pp, lurah, camat, dan pihak-pihak lainnya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan lokasi objek wisata pantai padang menjadi layak dikunjungi dan bebas dari aspek-aspek negatif payung ceper yang selama ini melekat ditengah masyarakat.”⁴⁰

Dari pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa dalam proses penertiban para pedagang payung ceper tersebut tidak ada terdapat unsur-unsur menyalahgunakan kekuasaan ataupun kepentingan-kepentingan tertentu yang dilakukan oleh para aktor implementor kebijakan tersebut, karena disini para aktor kebijakan memiliki visi dan misi atau tujuan yang sama dalam proses penertiban para pedagang kaki lima payung ceper tersebut. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh nurhayati, yaitu salah satu pedagang kelompok *sembilan belas* yang mendirikan payung ceper di pantai Purus Padang.

Nurhayati sebagai triangulasi menyatakan:

*”Dulu kami ado mambayia uang keamanan ka aparat-aparat ko mah, keceknyo kalau kami mambayia pitih tu payuang ceper kami dibuliahkan tagak tu ndak ka di razia doh. Tapi kironyo kami tetap jo di razia, tetap jo payuang-payuang kami dibongkanyo diak”.*⁴¹

Terjemahan: dulunya kami membayar uang keamanan kepada para aparat-aparat ini, mereka mengatakan jika kami membayar uang tersebut payung ceper kami di bolehkan untuk berdiri dan tidak akan di razia. Tapi ternyata kami tetap saja di razia, payung-payung kami tetap saja di bongkar.

⁴⁰Wawancara dengan Robert Candra EP Kepala Bidang Objek dan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang jalan Samudera No. 1 Padang Sumatera Barat. Tanggal 17 November 2015, pukul 12.00 WIB.

⁴¹Wawancara dengan Nurhayati pedagang kelompok Sembilan belas, di depan danau Cimpago pantai Purus Padang. Tanggal 02 Desember 2015, pukul 17.30 WIB.

Sedangkan hal yang berbeda dikatakan oleh Robert Chandra EP:

”Saya tidak menyangkal bahwa memang ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan pihak dinas pariwisata atau sebagainya, yang meminta uang keamanan atau retribusi kepada para pedagang payung ceper tersebut. Kami tidak pernah meminta uang retribusi kepada para pedagang tersebut, bagaimana kami akan meminta uang retribusi karena mereka tidak diperbolehkan berjualan karena melanggar aturan norma-norma yang telah diatur oleh pemko Padang, meskipun mereka sudah memiliki izin untuk berjualan.”⁴²

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Irwan selaku kepala bidang bagian penyuluhan dan penyidik Satpol PP Kota Padang.

”Memang sewaktu kami para satpol pp melakukan penertiban atau razia ini, para pedagang melawan, menolak, serta marah-marah kepada satpol pp. Mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka telah membayar uang retribusi kepada para aparat-aparat kami dan mereka di janjikan untuk tidak ditertibkan jika mereka telah membayar uang retribusi tersebut. Tetapi kami dari pihak satpol pp tidak pernah meminta uang keamanan, karena tugas kami hanya untuk menertibkan para pedagang payung ceper tersebut.”⁴³

Berdasarkan pernyataan infroman di atas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa tidak ada unsur kepentingan dalam proses penertiban para pedagang payung ceper tersebut. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa adanya beberapa oknum yang memanfaatkan situasi ini dan mengaku sebagai pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian izin untuk berjualan kepada para pedagang atau malah menggunakan status atau jabatan mereka untuk kepentingan-kepentingan mereka, hal yang serupa juga disampaikan oleh kasi operasional dan pengendalian Satpol PP Kota Padang bahwa semua pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemko padang dan juga adanya pengawasan

⁴²Ibid.

⁴³Irwan., Ibid.

kepada para pelaksana kebijakan tersebut, keterlambatan penerapan kebijakan ini di karenakan para pedagang payung ceper pada awalnya menolak untuk ditertibkan dan tidak mau mematuhi aturan-aturan yang berlaku.⁴⁴ Akan tetapi seharusnya pemko Padang juga mengawasi para aktor-aktor kebijakan yang menjalankan kebijakan ini agar tidak ada penyalahgunaan tugas dan wewenang yang mereka miliki.

b) Strategi dari aktor yang terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

Strategi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat akan ikut mempengaruhi proses penertiban para pedagang kaki lima payung ceper ini. Karena strategi yang digunakan oleh para aktor-aktor kebijakan tersebut akan mempengaruhi proses penerapan sebuah kebijakan, strategi yang digunakan harus bisa membuat para sasaran kebijakan dapat mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat tanpa merugikan kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Robert Chandra EP kepala bidang objek dan wisata menjelaskan beberapa strategi yang telah dilakukan untuk menertibkan para pedagang kaki lima payung ceper ini.

Robert Chandra EP menyatakan:

”Dinas pariwisata telah melakukan sosialisasi mengenai perda ini kepada para pedagang payung ceper, tidak hanya dengan cara sosialisasi saja tetapi juga dengan cara persuasif yaitu menghimbau para pedagang untuk kembali meninggikan payung-payung mereka. Dinas pariwisata melakukan koordinasi dengan satpol pp, lurah bandar purus, serta camat padang barat. Satpol pp

⁴⁴Wawancara dengan Sapparudin Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 24 November 2015, pukul 10.30 WIB.

bertugas untuk menertibkan para pedagang payung ceper tersebut, sedangkan lurah dan camat bertugas untuk memantau para pedagang tersebut.”⁴⁵

Hal yang sama juga dikatakan oleh Salman:

”Dalam proses pemberantasan pedagang payung ceper di pantai Purus ini, pihak dinas pariwisata, satpol pp, camat, dan sebagainya juga melibatkan kami kelurahan bandar purus. Karena para pedagang tersebut berada di kelurahan bandar purus, kami melakukan ajakan kepada pedagang untuk tidak mendirikan payung ceper itu lagi dan kami juga melakukan pemantauan setelah dilakukannya penertiban oleh pihak satpol pp. Karena pihak satpol pp dan dinas pariwisata yang lebih berperan dalam proses penertiban para pedagang payung ceper itu.”⁴⁶

Berdasarkan pernyataan infroman di atas bahwa dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang juga melakukan koordinasi dengan Satpol PP. Karena lokasi tersebut berada di Kelurahan Bandar Purus dan Kecamatan Padang Barat, dinas pariwisata dan satpol pp juga melakukan koordinasi dengan lurah Bandar Purus dan camat Padang Barat untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima payung ceper tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amzarus sebagai ketua koordinator penyidik Satpol PP Kota Padang, menjelaskan apa-apa saja strategi yang telah dilakukan dalam proses penertiban pedagang kaki lima payung ceper.

Amzarus menyatakan:

”Sebelum melakukan penertiban, satpol pp telah memberikan sosialisasi mengenai perda No 11 tahun 2005 ini kepada para pedagang. Kami telah memberikan surat edaran tersebut kepada ketua kelompok pedagang *sembilan belas* payung ceper. Di dalam sosialisasi tersebut kami memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pedagang,

⁴⁵Robert Candra EP., Ibid.

⁴⁶Wawancara dengan Salman Lurah Bandar Purus, di kantor Kelurahan Bandar Purus. Tanggal 23 November 2015, pukul 10.00 WIB.

serta menjelaskan pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pedagang payung ceper.”⁴⁷

Peneliti memperoleh data berupa arsip surat edaran atau undangan mengenai sosialisasi perda No 11 tahun 2005 kepada ketua pedagang kelompok *sembilan belas* payung ceper, data tersebut dapat di lihat pada lampiran 9 (sembilan).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Arfian selaku camat Padang Barat.

Arfian menyatakan:

”Satpol pp telah memberikan surat edaran mengenai sosialisasi perda tersebut kepada pedagang payung ceper, kecamatan padang Barat juga ikut serta di dalamnya. Tetapi kami hanya sebatas mengawasi, memberikan penyuluhan, atau ajakan untuk kembali meninggikan payung ceper saja.”⁴⁸

Berdasarkan kutipan wawancara di atas bahwa sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pemko Padang melalui dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang dan Satpol PP Kota Padang terlebih dahulu memberikan surat edaran mengenai sosialisasi terhadap perda Kota Padang No 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada para pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang.

Strategi berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam penertiban pedagang kaki lima payung ceper adalah dengan membongkar, membakar payung-payung ceper tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh

⁴⁷Wawancara dengan Amzarus Ketua Koordinator Penyidik Satpol PP Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 24 November 2015, pukul 14.00 WIB.

⁴⁸Wawancara dengan Arfian Camat Padang Barat, di kantor Kecamatan Padang barat jalan Veteran No 85 Padang Barat Kota Padang. Tanggal 24 November 2015, pukul 11.20 WIB.

peneliti dengan Saparuddin selaku kasi operasi dan pengendalian Satpol PP Kota Padang.

Sapparudin menyatakan:

”Kami juga melakukan pembongkaran serta pembakaran payung-payung ceper itu jika para pedagang tidak mau mematuhi aturan yang sudah kami sosialisasikan sebelumnya kepada para pedagang. Karena para pedagang bersikeras untuk tetap berjualan, meskipun kami sudah memberikan himbauan sebelumnya. Banyak para pedagang melakukan perlawanan terhadap para aparat-aparat kami.”⁴⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh Amzarus:

”Setelah dilakukan pembongkaran serta dibakarnya payung-payung ceper para pedagang payung ceper itu, tetap saja mereka tidak mau jera mereka malah kembali berjualan dalam beberapa hari lagi. Sehingga kami dan dinas pariwisata membuat surat pernyataan yang kami berikan kepada ketua pedagang kelompok *sembilan belas* yang di dalam surat itu berisi apabila pedagang mau menaikkan kembali payung mereka, kami satpol pp tidak akan merazia dan mengawasi mereka dan dinas pariwisata akan mengizinkan mereka berjualan disana dan tidak akan memindahkan lokasi berjualan mereka. Tetapi tetap saja mereka tidak mengindahkan himbauan kami.”⁵⁰

Peneliti memperoleh data berupa arsip surat perjanjian atau pernyataan yang diberikan kepada ketua kelompok pedagang *sembilan belas* payung ceper oleh Satpol PP Kota Padang, data tersebut dapat di lihat pada lampiran 10 (sepuluh).

Setelah diberikannya surat perjanjian atau pernyataan tersebut kepada ketua kelompok pedagang *sembilan belas* payung ceper oleh pihak Satpol PP, tetapi tetap saja para pedagang tidak menghiraukan perjanjian tersebut dan tetap bertahan untuk mendirikan payung ceper mereka kembali. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua pedagang kelompok *sembilan belas*,

⁴⁹Sapparudin., Ibid.

⁵⁰Amzarus., Ibid.

Epi H sebagai triangulasi menyatakan:

*"Yo, emang ado diagiahannyo dek Satpol PP ka ibuk surek perjanjian tu nak. Di dalam surek tu di kecekan payuang-payuang kami disuruhnyo ditagakan baliak, tu kalau kami namuah managakan baliak kami ndak ka di razia-razia lay doh. Itu seh kalau ndak salah isi sureknyo, ndak takana ibuk lay doh. Nyo surek tu lah ibuk sampaian ka pedagang yang lain mah, tapi ndak ado nan namuah maninggian doh tu pengunjung ko kadang lah kami tinggian nyo ndak ado loh tibo ka tampek kami. Nyo taragak nan randah-randah ko deknyo, punyo ibuk lah ibuk cubo loh maninggian mah, tapi ndak ado urang tibo kasiko doh, nan ka tampek lain nan tetap randahnyo tibo. Pado ibuk surang seh nan tinggi rancak ibuk ceperan loh baliak payuang ibuk pado ndak makan loh wak deknyo."*⁵¹

Terjemahannya: ya, memang ada diberikannya oleh Satpol PP kepada ibu mengenai surat perjanjian itu. Di dalam surat tersebut dikatakan payung-payung kami agar ditinggikan kembali, jika kami mau kembali meninggikan maka kami tidak akan di razia-razia lagi. Hanya itu saja kalau tidak salah isi suratnya, ibu sudah tidak ingat lagi. Surat tersebut sudah ibu sampaikan kepada pedagang yang lain, tapi tidak ada yang mau meninggikan terkadang pengunjung ini jika kami sudah meninggikan kembali mereka malah tidak ada yang datang ke tempat kami. Mereka lebih suka yang rendah-rendah, punya ibu sudah juga ibu coba untuk ditinggikan, tapi tidak ada yang datang kesini, mereka malah memilih datang ke tempat yang rendah. Dari pada ibu sendiri saja yang tinggi bagusnya ibu tinggikan kembali dari pada iibu tidak makan.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, setelah melakukan sosialisasi perda Kota Padang No 11 tahun 2005 kepada para pedagang kaki lima payung ceper. Ternyata para pedagang tidak mematuhi aturan yang telah disosialisasikan oleh pemko Padang, dikarenakan hanya sebagian pedagang saja yang mematuhi himbauan tersebut dan sebagian pedagang lagi tidak menghiraukan himbauan tersebut. Alasan para pedagang tersebut tidak mau meninggikan payung-payung mereka lagi, dikarenakan pendapatan mereka menurun apabila mereka meninggikan payung ceper

⁵¹Wawancara dengan Epi H ketua pedagang kelompok Sembilan belas payung ceper, di depan danau cimpago pantai Purus padang. Tanggal 02 Desember 2015., pukul 17.15 WIB.

mereka. Sehingga Satpol PP kembali melakukan pembongkaran dan penertiban kepada para pedagang payung ceper. Akan tetapi para pedagang tetap menolak untuk ditertibkan, sehingga pemko Padang memberikan surat perjanjian melalui ketua pedagang kelompok *sembilan belas* payung ceper tersebut. Yang isi surat perjanjian tersebut yaitu melarang para pedagang untuk mendirikan payung ceper, tetapi para pedagang payung ceper tetap tidak mau mematuhi surat perjanjian yang telah dikeluarkan.

Dengan tidak dipatuhinya surat perjanjian yang telah diberikan Satpol PP melalui ketua pedagang kelompok *sembilan belas* tersebut, Satpol PP melakukan upaya lain dengan memberikan seluruh pedagang kelompok *sembilan belas* surat perjanjian yang langsung mereka tandatangani sendiri. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua koordinator Satpol PP Kota Padang,

Amzarus menyatakan:

”Kami sudah memberikan surat pernyataan kepada ketuanya tapi gagal, jadi kami mengundang semua pedagang *sembilan belas* payung ceper itu ke kantor Satpol PP. Dan disitu kami jelaskan lagi poin-poin yang ada dalam surat perjanjian, ya isi suratnya sama dengan surat yang pertama kami berikan ke ketuanya dulu. Padahal isi suratnya itu kami sudah memberikan kemudahan kepada para pedagang, jika mereka kembali meninggikan payung-payung mereka maka Satpol PP tidak akan merazia dan mengawasi mereka kembali. Surat-surat tersebut juga sudah disetujui oleh semua pedagang dan mereka semuanya menandatangani surat-surat itu.”⁵²

Peneliti memperoleh data berupa arsip surat pernyataan yang telah diberikan Satpol PP kepada seluruh pedagang kelompok *sembilan belas* payung ceper, yang

⁵²Ibid.

masing-masing surat tersebut telah ditandatangani oleh seluruh pedagang, data tersebut dapat dilihat pada lampiran 11 (sebelas).

Ternyata perjanjian tersebut tetap saja tidak dipatuhi oleh para pedagang payung ceper, para pedagang tetap saja kembali mendirikan payung ceper mereka. Seperti hasil wawancara peneliti dengan ketua kelompok pedagang *sembilan belas* di atas, bahwasanya jika mereka kembali mendirikan payung ceper tersebut maka mereka akan mengalami penurunan pendapatan dan berkurangnya pengunjung yang datang ke tempat mereka. Sehingga pemko Padang menempuh cara lain dalam proses penertiban para pedagang kaki lima payung ceper ini.

Amzarus menyatakan:

”Kami kembali mengundang para pedagang tersebut dan mendata kembali para pedagang tersebut, lalu kami membuat surat perjanjian lagi. Tetapi sudah tiga kali kami membuat perjanjian dengan para pedagang tersebut, tetap saja mereka melanggar dan tetap tidak mau mematuhi kami.”⁵³

Peneliti memperoleh data berupa arsip surat pendataan para pedagang kelompok *sembilan belas*, data tersebut dapat dilihat pada lampiran 12 (dua belas).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saparuddin:

”Kami sudah beberapa kali mengeluarkan surat perjanjian untuk para pedagang payung ceper itu, ya sudah sebanyak tiga kali lah. Tetapi surat yang terakhir itu lebih ke pendataan saja. Tapi ya tetap saja tidak ada saja hasilnya para pedagang tetap saja tidak mau peduli, ya maklumlah memang tidak mudah menertibkan para pedagang kaki lima. Lalu kami melakukan upaya lain yaitu dengan memberikan ESQ kepada para pedagang, disini kami bekerjasama dengan Herman Nawas yang punya kampus UPI. Kami mengharuskan seluruh pedagang payung ceper untuk ikut ESQ di UPI, ya

⁵³Amzarus., Ibid.

kami lebih memberikan pendekatan dengan cara spiritual kepada para pedagang. ESQ ini juga di hadiri oleh walikota dulu pak Fauzi Bahar.”⁵⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh Irwan:

”Selain memberikan surat himbauan dan perjanjian, kami juga melakukan pelatihan spiritual ke pedagang. Karena dengan memberikan surat himbauan tersebut tidak ada hasil apa-apa, jadi kami melakukan cara dengan pendekatan yaitu memberikan ESQ ke pedagang. Yang kami bekerjasama dengan pemilik UPI Herman Nawas, disana para pedagang diberikan pendidikan rohani selama tiga hari, saya lupa tepatnya kapan. Setelah selesai kegiatan tersebut para pedagangpun berjanji kepada kami yang disana juga disaksikan oleh pak Fauzi Bahar Walikota Padang sebelumnya dan juga ada pak Herman Nawas. Mereka berjanji tidak akan mendirikan payung ceper lagi, dan mereka sendiri yang berinisiatif membakar payung-payung mereka. Lalu disana pak Herman Nawas dan pak Fauzi Bahar berjanji memberikan payung-payung baru yang lebih tinggi yang sengaja di desain tidak bisa direndahkan lagi dan juga memberikan meja-meja baru kepada para pedagang. Ya, ternyata hal tersebut juga percuma itu hanya bertahan beberapa hari saja. Pedagang kembali merendahkan payung mereka dan bahkan ada yang menjual payung tersebut ke pedagang lain.”⁵⁵

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa setelah dilakukannya sosialisasi dan perjanjian-perjanjian dengan para pedagang kaki lima payung ceper, ternyata upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sehingga pemko Padang yang bekerjasama dengan Herman Nawas melakukan pelatihan spiritual atau *ESQ* kepada seluruh para pedagang kaki lima kelompok sembilan belas payung ceper, setelah dilakukannya pelatihan *ESQ* tersebut pemko Padang berjanji akan memberikan bantuan payung-payung yang sengaja di desain tidak bisa direndahkan kembali, meja, dan kursi baru kepada para pedagang. Akan tetapi setelah beberapa hari para pedagang payung ceper kembali merendahkan

⁵⁴Sapparudin., Op.Cit

⁵⁵Wawancara dengan Irwan Kepala Bidang Penyuluhan Satpol PP Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 30 November 2015, pukul 09.15 WIB

payung mereka dan malah menjual payung-payung yang diberikan pemko Padang kepada para pedagang lainnya.

Ternyata Opet sebagai menyatakan hal yang berbeda:

*"Yo ado kami disuruahnyo ikuik ESQ tu nak aa di UPI tu, siap ESQ tu kaminyo janjian dek yang punyo UPI tu payuang-payuang baru. Soalnya sebagian payuang kami lah ado yang dibaka disitu kan, tu adolah yang diambiaknyo dek petugas samo meja jo kursi-kursi kami bagay yang diambiak. Keceknyo payuang, meja, jo kursi kami tu ka di ganti jo nan lebih baru kecek apak tu. Tu kami pedagang setuju-setuju seh kecek pemerintah ko kan. Tu lah bara hari siap ESQ tu saketek dari kami nan dapek payuangnyo nak, ndak sadoalahnyo nan dapek doh. Lah kami tunggu-tunggu ndak ado nan maagiah kami meja jo kursi baru gay doh. Kok kayak giko taruih baa caronyo kami ka makan dek anak. Tu yo tapaso ado sebagian kami nan manjua payuang nan diagiah waktu ESQ tu, jo apo kami ka makan. Rancak kami buek payuang ceper liak. Kami dijanjian sehnnyo, nyatonyo ndak ado apo-apo doh."*⁵⁶

Terjemahannya: ya kami memang ada disuruh agar mengikuti ESQ di UPI, setelah ESQ tersebut kami dijanjikan oleh pemilik UPI itu payung-payung baru. Soalnya sebagian payung kami sudah ada yang dibakar disitu, terus juga ada yang telah diambil oleh petugas sama meja dan kursi-kursi kami juga yang diambil. Mereka mengatakan bahwa payung, meja, kursi kami tersebut akan di ganti dengan yang baru. Kami selaku pedagang setuju-setuju saja dengan yang dikatakan oleh pemerintah ini kan. Setelah beberapa hari selesai ESQ hanya sedikit dari kami yang mendapatkan payungnya, tidak semua dari kami yang mendapatkan. Jika seperti ini terus bagaimana caranya kami buat makan. Ya terpaksa ada sebagian dari kami yang menjual payung yang diberikan sewaktu ESQ itu, sama apa kami mau makan. Lebih baik kami mendirikan payung ceper lagi. Kami ini hanya dijanjikan saja, nyatanya tidak ada apa-apa.

Hal serupa juga dikatakan oleh nurhayati:

"Kami kelompok sembilan baleh ko disuruah ikuik ESQ, siap tu payuang-payuang kami sebagian dibaka tu disita dek petugas jo meja kursi kami bagay. Tapi pak Herman Nawas tu nyo janjian kami ka diagiah payuang baru, jo meja kursi baru. Pas siap ESQ tu sebagian kami baru yang diagiah

⁵⁶Wawancara dengan Opet pedagang kelompok Sembilan belas payung ceper, di depan danau Cimpago pantai Purus Padang. Tanggal 12 Desember 2015, pukul 16.00 WIB.

payuang baru tapi alun jo meja jo kursinyo lay. Siap tu lah salasai ESQ ndak ado kabanyo seh lay doh nak, ndak ado petugas nan maagiah kami payuang, meja, kursi nan dijanjian tu doh. Lah kami tunggu bara hari tu mah, tu kabaa juo lay kan pado kami ndak makan ancak kami apoan payuang ceper ko baliak. Bialah padangan urang buruak, kami ndak peduli doh nan penting kami jo anak-anak kami bisa makan.”⁵⁷

Terjemahannya: kami kelompok *sembilan belas* ini di suruh agar mengikuti ESQ, setelah itu payung-payung kami dibakar terus meja dan kursi juga ikut disita. Tapi pak Herman Nawas menjanjikan kami akan diberi payung, meja, dan kursi baru. Setelah ESQ selesai baru sebagian kami yang diberi payung-payung baru tetapi belum beserta meja dan kursi. Setelah ESQ selesai tidak kabarnya lagi, tidak ada petugas yang memberikan kami payung, meja, kursi yang telah dijanjikan itu. Sudah kami tunggu beberapa hari, terus mau gimana lagi dari pada kami tidak makan lebih baik kami dirikan kembali payung ceper ini. Bagaimanapun pandangan orang, kami tidak peduli yang penting kami dan anak-anak kami bisa makan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa alasan para pedagang kembali mendirikan payung ceper, dikarenakan hanya sebagian dari para pedagang yang baru diberikan payung-payung baru. Sedangkan meja dan kursi yang dijanjikan akan di ganti oleh pemko Padang, ternyata setelah beberapa hari selesai *ESQ* belum juga diberikan oleh pemko Padang.

Setelah beberapa hari usai diadakannya pemberian atau pendidikan spiritual agama atau *ESQ* kepada para pedagang kaki lima payung ceper tersebut, ternyata para pedagang kembali mendirikan payung ceper mereka dan pemko Padang melalui Satpol PP kembali melakukan penertiban yaitu dengan kembali membongkar dan mengawasi lokasi tempat para pedagang tersebut berjualan. Seperti yang dikatakan oleh ketua koordinator penyidik Satpol PP Kota Padang berikut ini,

⁵⁷Wawancara dengan Nurhayati pedagang kelompok Sembilan belas, di depan danau Cimpago pantai Purus Padang. Tanggal 02 Desember 2015, pukul 17.30 WIB.

Amzarus menyatakan:

”Ternyata *ESQ* itu tidak mempan bagi pedagang, buktinya setelah beberapa hari mereka kembali berdagang. Ya alasan mereka karena pendapatan mereka berkurang dan payung-payung yang di janjikan tidak ada. Jadi Satpol PP kembali menertibkan, ya seperti biasa kembali membongkar dan pasti mendapat perlawanan. Tapi kami juga melakukan pengawasan setelah melakukan penertiban dan pembongkaran, agar mereka tidak membandel yaitu kembali mendirikan payung ceper.”⁵⁸

Ternyata Salman menyatakan hal yang berbeda:

”Ya, memang ternyata pedagang kembali berjualan meskipun mereka sudah ikut *ESQ*. Alasan pedagang itu karena pendapatan mereka menurun dan janji-janji yang disampaikan waktu selesai *ESQ* tidak terealisasi, saya tidak tau tepatnya gimana. Memang Satpol PP kembali melakukan penertiban dengan membongkar, tapi mereka setelah melakukan pembongkaran itu ya pergi saja. Sejauh saya melihat mereka tidak ada mengawasi, ya makanya para pedagang kembali berjualan, itulah yang membuat proses penertiban payung ceper dulunya begitu sulit. Karena pengawasan yang begitu kurang, makanya tidak salah kalau dalam beberapa hari payung ceper ada lagi.”⁵⁹

Memang tidak mudah menertibkan para pedagang kaki lima payung ceper di Pantai Purus ini, karena sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemko Padang dalam menertibkan para pedagang tersebut tetapi tidak membawa perubahan yang signifikan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu kepala bidang bagian objek dan wisata dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang berikut,

Robert Candra EP:

”Memang butuh waktu yang lama buat pemko padang untuk bisa menertibkan para pedagang payung ceper ini, sudah banyak cara yang kami lakukan tapi tetap tidak berhasil. Kami juga mengakui bahwa faktor komunikasi yang kurang dengan Satpol PP, Lurah, dan Camat juga mempengaruhi kinerja dalam proses penertiban ini. Serta kurangnya ketegasan kepada para pedagang

⁵⁸Amzarus., Ibid.

⁵⁹Salman., Op.Cit.

dan solusi yang diberikan kepada para pedagang merupakan faktor penghambat dalam proses penerapan kebijakan ini.”⁶⁰

Amzarus juga menyatakan hal yang sama:

”Penyebab lambatnya atau susahya menertibkan para pedagang ini karena kami kekurangan dana, personil, dan juga kurangnya komunikasi atau koordinasi dengan dinas pariwisata dan pihak-pihak lainnya.”⁶¹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan peneliti melihat bahwa kurangnya komunikasi, koordinasi, dan ketegasan para aktor-aktor kebijakan tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan susahya para pedagang kaki lima payung ceper tersebut untuk ditertibkan. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala bidang penyuluhan Satpol PP Kota Padang,

Irwan menyatakan:

”Kami kembali mengadakan rapat dengan dinas pariwisata, lurah, dan camat di kantor dinas kebudayaan dan pariwisata untuk membahas langkah baru yang akan dilakukan untuk menertibkan para pedagang payung ceper ini. Karena sudah begitu lama masalah payung ceper ini belum bisa terselesaikan juga.”⁶²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Arfian sebagai triangulasi:

”Sekitar awal tahun lalu (2014) saya dan juga lurah Bandar Purus mengikuti rapat di dinas pariwisata bersama Satpol PP juga, membahas bagaimana cara untuk benar-benar menertibkan para pedagang payung ceper ini. Saya akui memang dulunya kami kurang komunikasi juga koordinasi dalam menertibkan payung ceper ini. Di dalam rapat tersebut ya kita membahas langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan, strategi dan kerja sama kami

⁶⁰Wawancara dengan Robert Chandra EP Kepala Bidang Objek dan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang jalan Samudera No. 1 Padang Sumatera Barat. Tanggal 17 November 2015, pukul 12.00 WIB.

⁶¹Amzarus., Ibid.

⁶²Irwan., OP.Cit

juga harus diperbaiki. Yang penting sistem koordinasi kami disini harus diperbaiki lah.”⁶³

Setelah melakukan rapat dengan beberapa pihak-pihak yang berperan dalam proses penertiban pedagang payung ceper tersebut, satuan polisi pamong praja kembali melakukan penertiban dan pembongkaran payung ceper tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan,

Amzarus menyatakan:

”Karena tahun-tahun sebelumnya kami belum mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menertibkan para pedagang payung ceper ini, kami kembali menertibkan para pedagang dengan adanya tambahan personil waktu itu. Dan juga kami meminta bantuan TNI dan juga Polri, dan waktu itu juga ada dari dinas pariwisata beberapa orang. Dalam pembongkaran tersebut kami meminta para pedagang untuk harus mematuhi peraturan dari pemko Padang, dan juga untuk tidak berjualan di lokasi tersebut.”⁶⁴

Epi H sebagai triangulasi menyatakan hal berbeda:

*”Kami di minta ndak buliah manggaleh lay doh diak, di suruahnyo kami untuak ndak manggaleh disitu. Kok yo kami ndak buliah ado payuang ceper ko, ndak baa doh diak. Ibuk selaku ketuanyo aa mananyoan tu dima tampek kami manggaleh, agiah lah tampek kami untuak manggaleh, kecek aparat ko di usahoan-usahoan jo baru tampek kami untuak dima ka manggaleh ko. keceknyo kami ka dibuekan LPC tu nak aa, tapi pas kami di razia seh tampek tu seh alun siap lay.”*⁶⁵

Terjemahannya: Kita di minta untuk tidak boleh berjualan lagi, kami disuruh untuk tidak berjualan di lokasi itu lagi. Jika tidak boleh lagi ada payung ceper ini, kami tidak apa-apa. Ibu selaku ketua menanyakan dimana tempat kami berjualan, berilah kami tempat untuk berjualan. Aparat mengatakan diusahakan saja dimana tempat kami untuk berjualan. Mereka mengatakan

⁶³Wawancara dengan Arfian Camat Padang Barat, di kantor Kecamatan Padang barat jalan Veteran No 85 Padang Barat Kota Padang. Tanggal 24 November 2015, pukul 11.20 WIB.

⁶⁴Amzarus., Op.Cit.

⁶⁵Wawancara dengan Epi H ketua pedagang kelompok Sembilan belas payung ceper, di depan danau cimpago pantai Purus padang. Tanggal 02 Desember 2015., pukul 17.15 WIB.

bahwa kami dibuatkan *LPC* (lapau panjang cimpago), tetapi sewaktu kami di razia tempat itu saja belum selesai.

Robert Chandra EP menyatakan:

”Kami memang membangun *LPC* yang berlokasi di depan danau cimpago sebagai lokasi baru bagi para pedagang payung ceper itu. Kami disini lagi mengusahakan untuk segera menyelesaikan pengerjaan *LPC* tersebut agar segera bisa memindahkan para pedagang ke lokasi baru mereka berjualan. Tujuan lain kami membuat *LPC* juga untuk menghindari agar para pedagang tersebut tidak mendirikan payung ceper lagi dan juga bertujuan agar pantai padang lebih tertata dan lebih indah bila di lihat.”⁶⁶

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa solusi lain yang diberikan pemko Padang kepada para pedagang payung ceper tersebut adalah dengan membangun *LPC* (lapau panjang cimpago), para pedagang payung ceper tersebut lokasi berjualan mereka akan dipindahkan ke *LPC* tersebut untuk menghindari agar para pedagang tersebut tidak mendirikan payung ceper kembali. Akan tetapi sewaktu melakukan penertiban kepada pedagang payung ceper, pembangunan *LPC* tersebut belum selesai sehingga para pedagang mengeluhkan hal tersebut.

Peneliti memiliki dokumentasi mengenai *Lapau Panjang Cimpago* ini, dokumentasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 14 (empat belas) pada gambar 9 dan 10.

Berhubung akan dilakukannya Simulasi Mentawai Megathrust Direx (disaster relief exercise) pada bulan Maret tahun lalu (2014). Pemko Padang meminta dinas-dinas terkait untuk membersihkan pantai Padang dari lapak-lapak para pedagang kaki

⁶⁶Robert Candra EP., Ibid.

lima, khususnya dari lapak para pedagang kaki lima payung ceper. Seperti yang dikatakan oleh kepala bidang objek dan wisata dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang berikut ini,

Robert Chandra EP:

”Berhubung akan diadakannya simulasi tsunami di pantai Padang, jadi pak fauzi Bahar waktu itu menginstruksikan kami untuk menertibkan sementara para pedagang kaki lima di pantai Padang. Bukan hanya pedagang payung ceper saja, tapi seluruh para pedagang yang berjualan di pinggir pantai yang di pasir-pasir pantai itu. Karena lokasi itu akan dipakai untuk pendaratan helikopter juga kan, jadi ditakutkan akan membahayakan para pedagang. Dan alasan lain juga karena ini acara internasional dan di hadiri oleh beberapa negara dan juga presiden, jika para pedagang payung ceper tetap ada itu akan merusak citra wisata padang jadinya. Makanya kami meminta sementara para pedagang untuk bersedia untuk ditertibkan sementara, dan setelah acara tersebut selesai kami memperbolehkan mereka berjualan kembali. Dalam proses pembersihan pantai Padang ini, kami dan Satpol PP juga di bantu oleh TNI, Polri, dinas lain, dan juga masyarakat.”⁶⁷

Amzarus menyatakan hal yang sama:

”Cikal bakal kami bisa menertibkan para pedagang payung ceper itu gara-gara ada proyek Megathrust itu, waktu kami menertibkan para pedagang payung ceper itu kami mengatakan bahwa penertiban ini hanya sementara karena lokasi mereka berjualan akan di jadikan tempat simulasi tsunami dan juga tempat mendaratnya helikopter. Dan kami juga mengatakan bahwa malu jika payung ceper ini di lihat oleh pak presiden apalagi negara-negara lain. Tetapi setelah Megathrust itu selesai kami selaku Satpol PP terus menjaga lokasi tempat payung ceper tersebut, agar para pedagang itu tidak bisa mendirikan payung ceper lagi. Mereka melakukan perlawanan kepada kami, kami dibilangnya pembohong. Tapi disitu dinas pariwisata juga menjanjikan kepada para pedagang akan segera menyelesaikan *LPC* agar segera bisa ditempati oleh para pedagang payung ceper, dan kami juga mengatakan bahwa bukan mereka saja yang akan kami pindahkan lokasi berjualannya. Tetapi seluruh pedagang kaki lima di pantai Padang akan kami tertibkan dan kami atur tempat mereka berdagang, agar tidak menghalangi pandangan ke pantai. Jadi disini kami terus melakukan penjagaan di lokasi dan disana kami juga membuat pos penjagaan untuk Satpol PP yang menjaga, dan kami juga

⁶⁷Ibid.

berkoordinasi dengan Lurah Purus dan Camat Padang barat untuk melakukan pengawasan terhadap para pedagang.⁶⁸

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas dengan akan diadakannya simulasi Mentawai Megathrust Direx, merupakan awal para pedagang kaki lima payung ceper tersebut bisa ditertibkan. Dikarenakan lokasi pantai Padang tersebut harus dibersihkan dari para pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan disekitar pantai Padang. Yang pada saat itu pemko Padang meminta kepada para pedagang untuk sementara mau ditertibkan, akan tetapi setelah acara simulasi gempa selesai pemko Padang selalu mengawasi lokasi payung ceper tersebut oleh Satpol PP agar para pedagang payung ceper tidak kembali berjualan atau mendirikan payung ceper.

Salman sebagai triangulasi menyatakan:

”Ya, kami disini melakukan pengawasan terhadap para pedagang. Apabila ada yang masih nakal untuk kembali mendirikan payung ceper, setelah acara simulasi tersebut. Jika ada yang masih nekat kami akan melaporkan kepada Satpol PP, dan disana juga sudah ada pos-pos Satpol PP untuk pengawasan terhadap para pedagang.”⁶⁹

Epi H ketua pedangang kelompok sembilan belas payung ceper sebagai triangulasi menyatakan:

”Waktu ado simulasi tsunami tu kami disuruahnyo untuk ndak manggaleh dulu nak, soalnya pantai Padang ko ka di pakai untuak simulasi gampo tu. Jadi kami disuruah salamo bara hari supayo ndak manggaleh, lai kami patuhi kecek pemerintah disitu mah. Siap tu nak lah salasai acara tu kami dilarang untuak manggaleh baliak, padahal janjinyo kami ndak buliah manggaleh untuak samantaronyo. Tampek kami biaso manggaleh lah ado seh Satpol PP disitu, tu adolah tagak pos-pos Satpol PP bagay. Tu kami

⁶⁸Amzarus., Ibid.

⁶⁹Salman., Ibid.

tuntutlahnyo dek nak, sesuai janji ndak ado kayak gitu doh. tu ado dari pedagang nan berang-berang ka petugas tu mah. Tapi kecek pak dinas pariwisata, gantinyo kami diagiah tampek baru untuak manggaleh di LPC tu aa. LPC ka capek disiapan supayo kami bisa manggaleh disitu. Awalnya ado bara urang nan setuju ado nan indak, tapi kami dek lah mancaliak LPC tu laii di bangun makonyo kami nio nak. Dulu kami ndak nio diteriban tu dek ndak jaleh seh kami ka dipindahan kama nak aa, kok dari dulu kayak iko kami setuju-setuju seh mah.”⁷⁰

Terjemahannya: waktu diadakannya simulasi tsunami itu kami disuruh agar tidak berjualan dulu, dikarenakan pantai Padang ini akan di pakai untuk simulasi gempa. Jadi kami disuruh beberapa agar tidak berjualan, kami patuhi pemerintah. Setelah itu sesudah acara tersebut selesai kami dilarang berjualan kembali, padahal janjinya kami kami hanya tidak boleh berjualan cuma sementara saja. Tempat biasa kami berjualan sudah ada Satpol PP disitu, dan juga berdirinya pos-pos Satpol PP. Jadi kami menuntut, sesuai janji tidak ada seperti itu. Jadi ada beberapa pedagang yang marah-marah kepada para petugas. Tapi bapak dinas pariwisata mengatakan, sebagai gantinya kami diberi tempat baru untuk berjualan di LPC. Awalnya ada beberapa yang setuju dan ada juga yang tidak, tapi karena kami sudah melihat adanya pembangunan LPC tersebut makanya kami setuju. Dulunya kami menolak untuk diteribkan karena tidak ada kejelasan kami akan dipindahkan kemana, jika dari dulu seperti ini maka kami akan setuju-setuju saja.

Opet menyatakan hal yang sama:

”Siap ado simulasi gampo tu yo ndak bisa kami manggaleh lay, tapi dek kami ka diagiah tampek di LPC makonyo kami mangalah seh lay diak. Soalnyo di janjian disitu kami nan partamo ka diagiah tampek disitu, soalnyo sadoalah pedagang kan ka manggaleh di lokasi tu mah. Tu kecek pak pariwisata izin kami ka diperbaharui tu salamo satahun kami bebas dari biaya retribusi LPC tu”.⁷¹

Terjemahannya: setelah adanya simulasi gempa tersebut kami tidak bisa berjualan kembali, tetapi karena kami akan diberi tempat di LPC makanya kami mengalah saja. Dikarenakan kami dijanjikan pertama yang akan diberikan tempat disitu, karena semua pedagang akan berjualan di lokasi tersebut. Dan juga bapak pariwisata mengatakan bahwasanya izin kami juga akan diperbaharui dan juga selama setahun kami akan dibebaskan dari biaya

⁷⁰Epi H., Ibid.

⁷¹Wawancara dengan Opet pedagang kelompok Sembilan belas payung ceper, di depan danau Cimpago pantai Purus Padang. Tanggal 12 Desember 2015, pukul 16.00 WIB.

retribusi *LPC* tersebut.

Kusdarini sebagai triangulasi pakar kebijakan menyatakan:

”PKL Payung Ceper yang ada di sepanjang pantai padang itu ide awalnya adalah bentuk kafe-kafe yang bisa mendukung objek wisata pantai padang. Sehingga keberadaan café ini sangat membantu masyarakat/wisatawan yang sedang berkunjung ke pantai padang. Para PKL ini juga dikenakan retribusi. Sehingga kalau dianggap keberadaan mereka dianggap melanggar ketertiban, mereka merasa keberatan karena adanya karcis retribusi yang dibayarkan. Tetapi pada perkembangan berikutnya, terjadi penyalahgunaan payung pelindung ini untuk hal-hal yang melanggar etika dan norma yang berlaku. Dan hal ini masih dibiarkan saja. Pernah para pemilik kafe payung ceper ini mendapatkan pelatihan ESQ, dan payung ceper itu diganti sama payung yang lebih tinggi sehingga tidak memungkinkan berbuat mesum di kafe ini. Tetapi dampaknya pengunjung yang datang turun drastis dan income pemilik kafe juga ikut menurun. Hal ini juga menjadi keluhan pemilik café payung ceper ini. Akhirnya mereka kembali menggunakan payung ceper lagi, dan sekarang penertiban sudah mulai ada penegasan sehingga tidak ada lagi kafe payung ceper yang dianggap sangat meresahkan karena sudah tidak sesuai dengan filosofi adat basandi syarak syarak basandi kitabullah. Faktor yang menyebabkan lamanya proses penertiban ini adalah kurangnya ketegasan dalam penertiban PKL ini. Seharusnya ketika ada indikasi penyalahgunaan fasilitas publik yang dinilai meresahkan dan bertentangan dengan norma yang berlaku, segera ditertibkan. Bukan membiarkan saja. jika ini dilakukan secara tegas dan pengawasan dilakukan secara kontinyu, mungkin akan tidak memerlukan waktu yang lama untuk upaya penertiban. Masyarakat juga diberikan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar norma di fasilitas publik.”⁷²

Disini peneliti memiliki dokumentasi mengenai Simulasi Megathrust, dokumentasi tersebut dapat di lihat pada lampiran 14 (empat belas) pada gambar 7 dan 8.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemko Padang telah melakukan beberapa upaya dalam proses

⁷²Wawancara dengan Kusdarini di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Tanggal 07 Desember 2015, pukul 13.35 WIB.

penertiban pedagang kaki lima payung ceper ini. Seperti melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai perda No 11 Tahun 2005, memberikan surat peringatan dan perjanjian kepada para pedagang, melakukan penertiban secara berulang-ulang, dan juga memberikan pendidikan spritual atau *ESQ* kepada para pedagang, akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan. Menurut analisis peneliti faktor yang menyebabkan lambatnya proses penerapan kebijakan dan penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang dikarenakan kurangnya komunikasi antar aktor-aktor kebijakan, kurang adanya sikap ketegasan dari pemko Padang terhadap para pedagang, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap para pedagang, dan di dalam proses penertiban belum adanya pemecahan masalah yang diberikan oleh pemko Padang kepada para pedagang yaitu pemecahan masalah yang juga tidak merugikan para pedagang.

Setelah dilakukannya pembenahan di dalam aktor-aktor kebijakan tersebut, seperti pembenahan dalam komunikasi dan koordinasi, strategi yang akan dilakukan, ketegasan, serta solusi yang diberikan kepada para pedagang yaitu adanya kepastian lokasi berjualan yang legal bagi pedagang barulah pemko Padang bisa menertibkan para pedagang tersebut. Para pedagang tersebut baru bisa ditertibkan berawal dari akan diadakannya Simulasi Mentawai Megathrust Direx di lokasi pantai Padang, sehingga pemko Padang meinta para pedagang untuk mengosongkan sementara tempat mereka berjualan dan mereka dijanjikan boleh kembali berjualan setelah acara tersebut selesai. Jika sebelumnya pemko Padang sudah memiliki penyelesaian

masalah sebelumnya maka proses implementasi kebijakan ini tidak akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak harus menunggu simulasi Megathrust tersebut.

Sesuai dengan yang peneliti lihat di lokasi penelitian yaitu di pantai Purus Padang yang dulu didirikannya payung ceper, sekarang lokasi tersebut telah di bangun taman-taman untuk menghindari agar para pedagang tidak kembali berjualan dan mendirikan payung ceper kembali. Dan juga sekarang para pedagang payung ceper yang telah ditertibkan tersebut telah menempati *LPC* sebagai lokasi baru mereka untuk berjualan.

Peneliti memiliki dokumentasi lokasi sebelum dan sesudah payung ceper tersebut ditertibkan, data tersebut berupa sebuah foto-foto yang dapat dilihat pada lampiran 14 (empat belas) pada gambar 1 sampai dengan gambar 5.

Peneliti disini melihat bahwa dalam indikator ini bahwa adanya pemanfaatan kekuasaan dan kepentingan pribadi dari oknum-oknum tertentu, sehingga mempengaruhi proses penerapan kebijakan ini. Strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan ini juga mempengaruhi proses penerapan kebijakan, tidak tepatnya strategi dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh aktor kebijakan mengakibatkan lambatnya kebijakan ini bisa terealisasi pada para pedagang kaki liman payung ceper.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam upaya penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

Menurut Grindle, suatu implementasi kebijakan yang baik sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan itu sendiri. Pada variabel ini karakteristik lembaga serta rezim yang berkuasa memiliki indikator penunjang keberhasilan yang sangat besar. Kebijakan yang sifatnya *top down* harus memiliki lembaga pelaksana yang memang paham akan bidangnya. Dari beberapa instansi atau dinas yang telah peneliti lakukan pengambilan data dan wawancara, ada beberapa dari mereka yang tidak terlalu paham terhadap tugasnya sebagai aktor kebijakan. Hal ini disebabkan oleh silih bergantinya orang-orang yang menjabat di dinas tersebut yang mengakibatkan pengetahuan pejabat selanjutnya tidak maksimal. Asumsi peneliti disini dibenarkan oleh Sapparudin selaku kepala seksi operasi dan pengendalian Satpol PP Kota Padang Sapparudin menyatakan:

“Pasti setiap beberapa tahun ada pergantian jabatan yang dilakukan di dinas-dinas, hal itu juga akan mempengaruhi kinerja sebelumnya. Juga akan mempengaruhi proses penerapan kebijakan ini, apalagi strukturnya juga berubah pasti juga akan memberikan dampak terhadap proses penerapan kebijakan.”⁷³

⁷³Wawancara dengan Sapparudin Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 24 November 2015, pukul 10.30 WIB.

Hal serupa juga dikatakan oleh Amzarus:

“ya, adanya pertukaran jabatan pasti juga mempengaruhi proses penerapan kebijakan dan juga penertiban para pedagangnya. Karena memiliki karakter yang berbeda-beda juga kan.”⁷⁴

Jadi disini peneliti dapat menganalisa bahwa dengan adanya pergantian jabatan atau wewenang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan itu sendiri, akan tetapi dalam beberapa dinas atau instansi yang peneliti lakukan pengambilan data dan wawancara. Pergantian struktur atau jabatan mereka tetap berada di ruang lingkup yang sama atau mereka tetap berada dari bidang yang sama, jadi mereka sebelumnya memang sudah terlibat atau mengetahui proses penerapan atau penertiban pedagang payung ceper tersebut sebelumnya.

Berbicara mengenai rezim yang berkuasa, maka disini peneliti akan menganalisa bagaimana pengaruh bergantinya kepemimpinan Kota Padang terhadap proses penertiban pedagang kaki lima payung ceper, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang

Medi Iswandi:

”Ya, dengan bergantinya walikota Padang sekarang ini juga mempengaruhi proses penerapan kebijakan ini. Jadi disini seperti salah satu dari sepuluh janji pak Mahyeldi yaitu menjadikan wisata pantai Padang sebagai objek wisata yang layak untuk keluarga, jadinya kami dilakukan pembenahan. Meskipun pak Mahyeldi juga melanjutkan dari pak Fauzi Bahar. Tetapi disini pak Mahyeldi lebih bersikap tegas dan memberikan pengarahan kepada kami.

⁷⁴Wawancara dengan Amzarus Ketua Koordinator Penyidik Satpol PP Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padang jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 24 November 2015, pukul 14.00 WIB.

Serta melakukan banyak perombakan kepada kami dan melakukan pengawasan serta turun ke lapangan bersama kami.”⁷⁵

Firman Daus menyatakan hal yang sama:

”Semenjak pak mahyeldi menjadi walikota, ini juga mempengaruhi dalam proses penertiban. Karena masalah payung ceper ini kan juga sudah cukup lama, jadi pak Mahyeldi kan menjanjikan akan memberantas semua penyakit masyarakat khususnya para pedagang payung ceper ini. Jadi kami disini di minta cukup ekstra dalam proses penertiban. Adanya beberapa pembenahan yang dilakukan oleh pak Mahyeldi seperti adanya penambahan aparat dan juga pengadaan alat. Serta setelah penertiban tersebut kami di minta terus mengawasi lokasi payung ceper tersebut dari pukul 08.00-18.00 WIB setiap harinya.”⁷⁶

Kusdarini sebagai triangulasi pakar/ahli menyatakan:

”Dalam penerapan sebuah kebijakan, apabila adanya pergantian atau perubahan struktur dan wewenang dalam aktor-aktor kebijakannya secara tidak langsung juga akan mempengaruhi proses penerapan kebijakan itu sendiri. Dikarenakan setiap aktor-aktor kebijakan memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisa bahwa pergantian jabatan atau wewenang dalam instansi atau dalam aktor-aktor kebijakan juga akan mempengaruhi proses penerapan kebijakan serta penertiban para pedagang payung ceper tersebut, karena para aktor-aktor kebijakan tersebut pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda. Serta perubahan rezim yang berkuasa seperti adanya pergantian walikota juga akan mempengaruhi watak para aktor dan juga mempengaruhi proses penertiban para pedagang kaki lima payung ceper tersebut.

⁷⁵Wawancara dengan Medi Iswandi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, jalan Samudera No 1 Padang. Tanggal 27 November 2015, pukul 11.30 WIB.

⁷⁶Wawancara dengan Firman Daus Sekretaris Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP) Kota Padang, di kantor Satpol PP Kota Padanf, jalan Tan Malaka No. 3C Kota Padang. Tanggal 30 November 2015, pukul 09.40 WIB.

⁷⁷Kusdarini., Ibid.

Seperti adanya pembenahan yang dilakukan oleh Mahyeldi di dalam aktor-aktor kebijakan, serta adanya ketegasan yang diberikan kepada para aktor-aktor kebijakan dan kepada kelompok sasaran kebijakan.

Peneliti disini melihat bahwa dengan bergantinya struktur kepemimpinan dan jabatan dalam aktor-aktor kebijakan tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi proses kebijakan ini. Dikarenakan setiap aktor kebijakan memiliki karakter-karakter yang berbeda.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana penerapan kebijakan dalam upaya penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang

Seberapa besar kepatuhan serta respon yang diberikan pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan akan memberikan hasil implementasi kebijakan yang baik. Artinya ada sikap menerima kebijakan yang ditunjukkan oleh implementor, hal berikut merupakan hasil wawancara dengan kepala bidang objek dan wisata dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang

Robert Chandra EP menyatakan:

”Kebijakan ini sebenarnya memang wajib dipatuhi kan ini mengenai ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat. Apalagi tentang payung ceper, kan memberantas maksiat dan juga lebih kembali menormalkan fungsi tempat wisata itu sebenarnya untuk apa, yaitu untuk rekreasi keluarga. Dan juga tujuannya kan juga untuk kembali mengindahkan dan membersihkan pantai Padang ini.”⁷⁸

⁷⁸Robert Chandra EP., Op.Cit.

Berdasarkan pernyataan infroman di atas peneliti melihat bahwa aktor-aktor yang terlibat sepenuhnya mendukung proses penertiban para pedagang payung ceper ini agar objek wisata pantai Padang tertata rapi dan mengembalikan seperti semula fungsi pantai Padang itu sendiri.

Sapparudin menyatakan hal yang sama:

”Tugas kami kan menjalankan perda, jadi kami memang harus mendukung semua kegiatan pemerintah. Apalagi tentang memberantas maksiat ini, karena ini merupakan bentuk penyakit masyarakat yang harus diberantas. Dan kami juga sudah membagi tugas-tugas tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing.”⁷⁹

Arfian menyatakan:

”Sejauh yang saya lihat dinas pariwisata dan satpol pp sangat bersungguh-sungguh dalam upaya untuk memberantas payung ceper ini. Karena mereka selalu melakukan penertiban kepada para pedagang dan membuahkan hasil yang bagus pada sekarang kan, karena payung ceper sekarang sudah benar-benar tidak ada lagi.”⁸⁰

Salman menyatakan hal yang sama:

”Dalam upaya penertiban payung ceper ini dinas pariwisata dan satpol pp sangat serius ya saya lihat, apalagi mereka juga melibatkan kami disini. Mereka juga selalu memberikan koordinasi.”⁸¹

Kusdarini sebagai triangulasi pakar/ahli menyatakan:

”Setiap aktor kebijakan harus kompeten dalam penerapan sebuah kebijakan, dan memiliki kepatuhan dalam prosesnya tidak setengah. Karena hal itu akan berdampak pada kebijakan yang akan diterapkan. Karena suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil juga tergantung kepada aktor dalam sebuah kebijakan itu sendiri”.

⁷⁹Sapparudin., Ibid

⁸⁰ Wawancara dengan Arfian Camat Padang Barat, di kantor Kecamatan Padang Barat jalan Veteran No 85 Padang Barat Kota Padang. Tanggal 24 November 2015, pukul 11.20 WIB.

⁸¹Wawancara dengan Salman Lurah Bandar Purus, di kantor Kelurahan Bandar Purus. Tanggal 23 November 2015, pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisa bahwa setiap program yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait selaku aktor kebijakan tersebut tentunya akan tunduk terhadap peraturan pemerintah yang telah ada perumusan sebelumnya. Sehingga tidak ada alasan lain yang menjadikan para aktor-aktor kebijakan tersebut lupa akan tugas dan fungsi mereka, karena jika salah satu aktor kebijakan tersebut tidak mematuhi maka juga akan menjadi penghambat proses implementasi kebijakan ini.

Peneliti melihat bahwa dalam indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan ini, para aktor-aktor kebijakan memiliki tingkat kepatuhan dalam proses penerapan kebijakan dalam penertiban para pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang.

Ternyata ada beberapa faktor dari aspek yang dikemukakan oleh Grindle yang belum terpenuhi dalam proses penertiban para pedagang payung ceper, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses penerapan kebijakan. Seperti adanya kepentingan yang mempengaruhi dalam proses penerapan kebijakan tersebut, manfaat dari kebijakan yang kurang dirasakan oleh para pedagang yang ditertibkan, faktor kekurangan sumber daya manusia serta sumber daya finansial, serta pemecahan masalah yang belum diberikan pemko Padang pada awal kebijakan tersebut diterapkan (strategi).